

KONSEP NASIONALISME RELIGIUS
ERA REFORMASI DAN PASCA REFORMASI



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SOLAHUDIN
03370329

PEMBIMBING

- 1. DR. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Secara umum nasionalisme religius menginginkan terbangunnya simbol-simbol Islam dalam wilayah kenegaraan seperti negara Islam, konstitusi Islam struktur dan infrastruktur politik Islam dan sebagainya. Meskipun karakter perjuangannya ada yang radikal dan moderat. Di Indonesia nasionalisme religius mengalami pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) dari masa awal kemerdekaan sampai pada pasca Reformasi. Pada masa awal kemerdekaan nasionalisme religius masih melakukan upaya penerapan ajaran dalam wilayah negara, selanjutnya berujung pada konfrontasi dan dialogis dalam perjuangannya, memasuki masa orde baru nasionalisme religius hanya dijadikan "kotak politik" oleh penguasa orde baru yang didalamnya hanya ada pancasila. Hal ini disebabkan karena adanya depolitisasi islam yang dilakukan orde baru. Upaya pemerintah orde baru tersebut, selanjutnya ditanggapi oleh tokoh nasionalis religius dengan menggelindingkan politik akomodasi terhadap negara, memasuki era reformasi dan pasca reformasi nasionalisme religius bergeser seratus delapan puluh derajat akibat adanya kebebasan pada semua aspek. Akibatnya Munculnya nasionalisme religius era awal kemerdekaan yang menginginkan adanya penerapan simbol-simbol islam dalam negara ini didasarkan adanya upaya untuk menerapkan Piagam Jakarta, selanjutnya memasuki pasca reformasi nasionalisme religius tidak lagi menginginkan termanifestasinya simbol-simbol dalam negara tapi nasionalisme religius menjadi komoditas politik, ini bisa dibuktikan dengan makin maraknya pengagamaan dalam politik, seperti muncul partai yang memakai jargon nasionalis religius padahal secara pinsipil tidak berlatar belakang religius, pada pemilihan presiden 2004 nasionalis religius juga dijadikan komoditas untuk mendapat dukungan bagi para pemilih. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dijelaskan pergeseran paradigma dan konsep nasionalisme religius era dan pasca reformasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisa konsep nasionalisme religius era dan pasca reformasi, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *historis* dan menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisa dengan jelas konsep nasionalisme religius era dan pasca reformasi dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

Pada hasil penelitian, penyusun mengambil kesimpulan bahwa secara umum orientasi dasar perjuangan dari nasionalisme religius adalah terbangunnya simbol-simbol Islam dalam wilayah kenegaraan seperti Negara Islam, konstitusi Islam struktur dan infrastruktur politik Islam. Akan tetapi memasuki dan pasca Reformasi Nasionalisme Religius hanya dijadikan komoditas politik untuk memperoleh kekuasaan (*way to power*).



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.27/04/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KONSEP NASIONALISME RELIGIUS ERA REFORMASI DAN PASCA REFORMASI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SOLAHUDIN

NIM : 03370329

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin 27 April 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori

NIP. 150276308

Penguji I

Drs. H. Kamsi, M.A.

NIP. 150231514

Penguji II

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150282522

Yogyakarta, 28 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150240524

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Solahudin
NIM : 03370329
Judul : KONSEP NASIONALISME RELIGIUS ERA REFORMASI
DAN PASCA REFORMASI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1429 H
19 Agustus 2008 M

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150276308

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Solahudin
NIM : 03370329
Judul : KONSEP NASIONALISME RELIGIUS ERA REFORMASI
DAN PASCA REFORMASI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Robi'ul Akhir 1430H
13 April 2009 M

Pembimbing II

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435

MOTTO

Berani Berkata “Jujur”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Terima kasih Allah SWT yang tak pernah enggan melimpahkan segalanya untuk hamba.
- Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebijakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j{	je
ه	h\`a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\`a>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\`a`	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qa\`f	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	thyyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	h}kmah
معاملة	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

مصلحة المرسلة	ditulis	mas}ahah al-mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	a> jahiyah
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	a> tansa>
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	i> karim
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	u> hujquq

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بِنِكَمْ	ditulis	ai bainakum
2. fathah + wawu mati قُولْ	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis ditulis	a`antum la`in syakartum
-----------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. **Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘I’(el)**

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-Qur`an al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

2. **Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘I’(el)nya**

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-sama> asy-syamsu
-----------------	--------------------	------------------------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت أهل السنة	ditulis ditulis	izā>alimat ahl as-sunnah
-----------------------	--------------------	-----------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. KONSEP NASIONALISME	19
A. Pengertian Nasionalisme	19
B. Sejarah Perkembangan Nasionalisme	23
C. Sekilas tentang Nasionalisme Religius	29

BAB III. NASIONALISME RELIGIUS ORDE LAMA DAN ORDE BARU	34
A. Sekilas tentang Nasionalisme Indonesia	34
B. Nasionalisme Religius Awal Kemerdekaan.....	39
C. Nasionalisme Religius Orde Baru.....	48
D. Nasionalisme Religius Era Reformasi dan Pasca Reforms.....	52
BAB IV. ANALISIS PERGESERAN NASIONALISME RELIGIUS.....	71
A. Pengaruh Ideologi Global	71
B. Pragmatisme Politik	75
BAB V. PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Curiculum Vitae.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dampak terbesar penetrasi barat ke dunia Islam adalah menyangkut konsep dan sistem politik kenegaraan. Konsep dan sistem politik barat ini dianggap a-historis oleh masyarakat muslim. Sehingga ketegangan perdebatan pendapat sulit terhindarkan, perdebatan itu diantaranya *nation state* dan Nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah realitas yang hadir secara tiba-tiba pada abad ke 17 masehi di Inggris sebagai sebuah tantangan terhadap tradisi kekuasaan gereja dan negara dari Revolusi Inggris atas nama kemerdekaan manusia.¹ Di dunia timur Nasionalisme muncul sebagai gerakan pemersatu untuk melawan kolonialisme. Usaha untuk menolak kolonialisme inilah yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan-tekanan disebut Nasionalisme. Melalui keinginan bersama di dasarkan pada persamaan kepentingan itu akhirnya menciptakan Nasionalisme Indonesia.²

Meski era kemerdekaan bangsa-bangsa dari penjajahan dan kolonialisme telah lewat, namun Nasionalisme tetap tumbuh dan berkembang

¹ Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sedjarahnja*, Cet I, (Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta,1961) hlm 21.

² Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Cet.ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001).

dalam masyarakat yang kemudian mengental dalam kehidupan kenegaraan yang berwujud *nation-state* (negara bangsa).³

Perwujudan dari *nation state* dilandasi oleh semangat Nasionalisme yang berkesadaran tinggi untuk membangun sebuah bangsa. Dengan perwujudan tersebut Nasionalisme memberikan identitas⁴ nasional, ia terdiri dari suatu daerah, suatu sejarah, suatu bahasa (biasanya), dan suatu agama.

Nation State merupakan unit utama yang didalamnya meliputi berbagai komponen masyarakat termasuk masyarakat agama yang heterogen. Sebaliknya dalam doktrin Islam klasik, masyarakat agama dengan identitas karakter khas Islam merupakan unit utama yang menunjukkan sebuah entitas ummat tersendiri atau bangsa tersendiri yang berasal dari latar kesejarahan, bahasa budaya, dan Negara atau *state* yang berbeda-beda.⁵

Sebagaimana dalam kamus besar bahasa Indonesia, Nasionalisme yang telah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata : nasional dan isme . kata nasional mempunyai arti ; 1) kebangsaan, 2) bersifat bangsa . sedangkan isme adalah paham atau ajaran, jadi Nasionalisme adalah (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri atau kesadaran

³ Muh Hermawan Ibnu Nurdin, "Islam, Nasionalisme, Nasionalisme Islam," <http://mhermawan.Blogspot.com/2007/09/Islam>, Akses 22 januari 2009.

⁴ Istilah identitas sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jelas terdefinisi, stabil, dan pasti. Namun juga jelas bahwa masyarakat mengatur hidup mereka agar menjadi cukup terbuka dan fleksibel sehingga memungkinkan mereka mengambil keuntungan dari pilihan perilaku yang berbeda yang mereka benarkan dalam kerangka sistem nilai, makna kebudayaan, dan agama mereka sendiri. Lihat Abdullah Ahmed Ana`im dalam *Islam dan Negara Sekular*, alih bahasa oleh Sri Murniarti (Bandung: Mizan, 2007), hlm 43.

⁵ Ahmad Yani Ansori, "Islam dan Negara Bangsa di Indonesia," makalah tidak di terbitkan, disampaikan dalam kuliah Fiqih Siyasah II, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijga. hlm. 5.

keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.⁶

Menurut Renan, Nasionalisme adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau untuk membangun masa depan bersama.⁷ dalam definisi ini pada tingkatan tertentu masih dianggap cocok, untuk mengatakan tidak sama sekali, dengan timbulnya gejala kebangsaan republik ini. Akan tetapi bila dilihat dalam kasus timbulnya ideologi nasional Indonesia adalah kurangnya perhatian Renan terhadap unsur agama sebagai dasar pembentukan Nasionalisme Indonesia.⁸

Bangsa, menurut Benedict Anderson,⁹ didefinisikan sebagai sebuah komunitas yang terbayang. Bangsa pada awalnya hanya bentuk imajinasi pikiran manusia, sehingga untuk memahami Nasionalisme Anderson mengaitkannya dengan sistem budaya suatu masyarakat yang mendahuluinya yaitu komunitas agama dan kuasa dinasti.

Sebenarnya sebelum diskursus Nasionalisme masuk kedalam suatu bangsa sudah ada nilai universal sebagai pemersatu, nilai itu adalah agama, sehingga Nasionalisme secara alami akan bersinggungan dengan agama yang

⁶ Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 509-60.

⁷ Muh Hermawan Ibnu Nurdin, "Islam,Nasionalisme dan Nasionalisme Islam," <http://mhermawan.blogspot.com>. Akses 22 Januari 2009.

⁸ Ahmad Suhelmi, *Soekarno versus Natsir*, Cet I (Jakarta: Darul Falah, 1999). hlm. 32.

⁹ Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Imaginer: Renungan dan asal usul penyebaran Nasionalisme*, alih bahasa Omi Intan Naumi, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

sudah lama berada dalam suatu bangsa. Secara umum orientasi dasar perjuangan dari Nasionalisme agama ini adalah terbangunnya simbol-simbol Islam dalam wilayah kenegaraan seperti Negara Islam, konstitusi Islam struktur dan infrastruktur politik Islam dan sebagainya.¹⁰ Meskipun karakter perjuangannya ada yang radikal dan moderat.

Sebelum bangsa-bangsa di Eropa mendefinisikan Nasionalisme, bangsa Indonesia sudah melakukan upaya nasionalisme yang berlandaskan lokalitas dan keagamaan. Perlawanan kaum muslim nusantara untuk mengusir para penjajah seperti Imam Bonjol, pangeran Diponegoro, Cut Nyadien dll. Mereka menggunakan simbol-simbol Islam untuk menggelorakan semangat rakyat melawan penjajah (mereka sering menyimbolkan penjajah sebagai orang kafir) ini mungkin bisa disebut sebagai “pre nasionalism” atau “proto nasionalism” Indonesia yaitu kesadaran untuk bebas dari penjajah dan penindasan dan juga kesadaran menumbuhkan rasa persatuan dan mengembangkan identitas budaya sendiri dikalangan kaum muslim diwilayah yang dikuasi oleh kekuatan kolonial belanda.¹¹

Pada masa awal kemerdekaan nasionalisme tidak lagi digunakan untuk melawan Kolonialisasi secara fisik, tetapi terpolarisasi pada perdebatan dalam menentukan dasar Negara Indonesia. Kubu Nasionalis sekuler menginginkan

¹⁰ Ahmad Yani Ansori, “Islam dan Negara Bangsa di Indonesia,” makalah tidak di terbitkan, disampaikan dalam kuliah Fiqih Siyasah II, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijga. hlm. 6.

¹¹ Syafiq A. Mughni, “Munculnya Kesadaran Nasionalisme Umat Islam”, dalam Komarudin Hidayat, *Menjadi Indonesia; 13 abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Cet I (Jakarta: Mizan, 2006) hlm. 525

Pancasila sebagai dasar Negara, sebaliknya Nasionalis Religius menginginkan Islam sebagai dasar Negara.

Nasionalisme Religius bergerak menuju cita-cita terbentuknya negara Islam dengan model konfrontasi dan model perundingan. Memasuki zaman orde baru Nasionalisme Religius “dikebiri” dalam sebuah kotak politik orde baru berupa *depolitisasi* dan Pancasila. Hal ini dikarenakan ketakutan pemerintah orde baru terhadap kekuatan Nasionalisme Religius yang dipandang dapat membahayakan stabilitas pemerintahan. Akan tetapi memasuki era pertengahan masa kekuasan orde baru para kaum Nasionalisme Religius yang dimotori oleh para Cendekiawan muslim merevitalisasi perjuangannya, mereka tidak lagi memperjuangkan aspirasi Islam secara simbolik, sebaliknya gerakan kultural Islam atau substansi lebih ditekankan. Setidaknya ini dibuktikan dengan pernyataan Nurcholis Madjid yang terkenal Islam Yes partai Islam No. Disisi lain juga Abdurahman Wahid melakukan gerakan wacana pribumisasi Islam.

Format baru gerakan Islam khususnya pada periode 1980-an. Pertama, kecenderungan semakin pudarnya kepemimpinan politik Islam dan kebangkitannya kepemimpinan para intelektual muslim, terutama yang berbasis diberbagai kampus utama Indonesia. Kedua, kecenderungan semakin lemahnya penonjolan pada masalah-masalah ritual atau *furu’iyah* dan tampak kian menonjolnya isu-isu intelektual,sosial,ekonomi, dan estetika dalam Islam. Ketiga, kecenderungan yang ditandai semakin melemahnya sikap-sikap sektarian dan semakin timbulnya non sektarian disebagian besar kalangan

umat Islam, terutama dikalangan generasi muda Islam. Keempat, kecenderungan memudarnya konsep umat yang dipahami bukan lagi sebagai komunitas muslim yang diikat oleh organisasi masa Islam, atau partai politik Islam yang eksklusif.¹²

Menurut Bahtiar Effendi¹³ dalam diskursus politik Islam modern secara umum terbagi menjadi tiga tahap. Pertama periode pra kemerdekaan yaitu seruan kearah kesatuan Islam dan Negara. Kedua periode pasca revolusi yaitu perjuangan demi Islam sebagai dasar ideologi. Ketiga periode orde baru yaitu penjinakan idealisme dan aktivisme politik Islam. Dari pentahapan itu para intelektual muslim membangun pola pemikiran agar Islam dan Negara bisa berjalin bekilidan atau politik Islam tidak hanya dimaknai secara simbol dan tidak memaksakan sebuah konsep dan sistem kenegaraan dengan simbol Islam.

Nasionalisme Religius sebagaimana didefinisikan oleh Mark Juergenmayer adalah orang-orang yang memiliki kepentingan agama, sekaligus politik. Menurut Mark Juergenmayer, bahwa nasionalis adalah orang yang dianggap ekslusif dalam urusan-urusan agama dan secara tepat bias disebut sebagai orang-orang konservatif, fundamentalis dan anti modernis. Tetapi ketika orang-orang seperti mereka melebur perspektif keagamaan mereka dan pandangan yang lebih luas tentang politik dan kehidupan sosial

¹² Dedy Djamarudin Malik, *Zaman Baru Islam Indonesia Pemikiran dan Aksi* , cet, 1 (Bandung: Zaman Wacana Mulia,1998), hlm. 31

¹³ Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Cet I (Jakarta: Paramadina, 1998).

bangsa mereka, maka orang harus menemukan istilah yang inklusif karena itu Jugenmeyer menyebut sebagai kaum nasionalis religius.¹⁴

Sekalipun mereka menolak ide-ide sekular, kaum Nasionalis Religius tidak menolak sama sekali politik sekular, termasuk politik negara-bangsa (*nation-state*) modern, sejauh negara-bangsa dipahami sebagai format modern kebangsaan di mana otoritas negara secara sistematis meliputi dan mengatur bangsa secara keseluruhan, baik melalui jalan demokratis maupun totaliter.¹⁵

Dari narasi yang telah dipaparkan diatas menurut hemat penyusun, Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas masyarakatnya muslim, dalam kontek Nasionalisme Religius mengalami pergeseran paradigma (*paradigm shift*), karena masing-masing zaman menujukan indikasi perbedaan dalam *setting* politiknya. Demikian halnya, memasuki era Reformasi¹⁶ dan pasca Reformasi Nasionalisme Religius tidak hanya dimiliki oleh kalangan yang berbasis agama (Islam) akan tetapi menjadi komoditas politik. Ini bisa dilihat dari asas sebagian partai di Indonesia seperti Demokrat, Golkar, Hanura, Gerindra bahkan PDIP tak jarang menggunakan simbol Nasionalisme Religius, padahal mereka lahir bukan dari relitas religiusitas. *Nah* dari narasi tersebut terlihat ada konsep berbeda dalam setiap zaman.

¹⁴ Mark Juergensmeyer “Menentang Negara Sekuler ; Kebangkitan Global Nasionalisme Religius”. (Bandung : Mizan, 1998). Hlm. 18.

¹⁵ Ruslani, “Nasionalisme-Religius”,<http://www2.kompas.com/>, akses 22 Januari 2009.

¹⁶ Era reformasi yang penyusun maksudkan adalah dimulai dari lengsernya presiden Soeharto sampai lengsernya Gusdur, sedangkan pasca reformasi adalah dimulai Presiden Megawati sampai sekarang.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Nasionalisme Religius era Reformasi dan Pasca Reformasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Menjelaskan bagaimana konsep Nasionalisme Religius era Reformasi dan pasca Reformasi.
- b. Menjelaskan bagaimana pergeseran paradigma tentang konsep Nasionalisme Religius

2. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah konsep Nasionalisme Religius era dan pasca Reformasi
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten, khususnya pemerhati dalam masalah politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Studi ini pertama mendasarkan diri pada penelitian kepustakaan baik berupa sumber-sumber primer atau skunder. Diantarnya Mark Juergenmayer dalam bukunya “*Menentang Negara Sekuler ; Kebangkitan Global*

*Nasionalisme Religius*¹⁷ : Menganalisa gerakan politik Nasionalisme Religius di dunia.

Benedict Anderson¹⁸ dalam bukunya *Komunitas-Komunitas Terbayang; Renungan Dan Asal Usul Penyebaran Nasionalisme*, menganalisa asal-usul nasionalisme dari sudut pandang Antropologi.

Soekarno dalam bukunya *Dibawah Bendera Revolusi*¹⁹ menganalisa tentang gagasan-gagasan Soekarno tentang Nasionalisme Indonesia.

Nurcholis Madjid dalam bukunya *Indonesia kita*²⁰ memaparkan tentang Nasionalisme Indonesia di analogikan dengan konsep madinah.

Disamping buku yang terkait dengan Nasionalisme penulis juga menemukan beberapa Skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Skripsi “Nasionalisme dalam Sarekat Islam”²¹, karya Syarifah Isnaeni, membahas nasionalisme dalam tubuh Sarekat Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Skripsi ini tentu berbeda dengan skripsi ini yang lebih menekankan pada konsep Nasionalisme Religius.

¹⁷ Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekuler ; Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*. (Bandung : Mizan, 1998).

¹⁸ Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Imaginer: Renungan dan Asal Usul Penyebaran Nasionalisme*, alih bahasa Omi Intan Naumi, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Cet ke-3 (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964).

²⁰ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, Cet I (Jakarta: PT. Gramedia, 2004)

²¹ Syarifah Isnaeni, *Nasionalisme dalam Sarekat Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Skripsi “ Nasionalisme Menurut A. Hasan”²², karya Dani Kamal Bahtiar, membahas tentang pandangan-pandangan A. Hasan tentang Nasionalisme. Ini berbeda dengan karya penyusun yang menfokuskan pada dataran konsep serta pergeseran paradigma.

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada yang membahas tentang konsep Nasionalisme Religius Era Reformasi dan Pasca Reformasi. Penelitian ini berbeda dengan literatur-literatur atau penelitian yang telah ada karena dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada konsep Nasionalisme-Religius Era dan Pasca Reformasi.

E. Kerangka Teoretik

Al-Quran, selain merupakan fenomena yang unik dalam sejarah peradaban manusia, juga merupakan pembawa risalah yang memberikan keistimewaan terhadap penalaran dan intelektual menuasia.²³ Dalam hal ini kemudian akan melahirkan para mufasir baik secara tekstual maupun kontekstual. Menentukan apakah teks Al-Quran dan Sunnah (*nash*) berlaku atau tidak pada sebuah masalah, dan apakah teks itu tegas atau tidak (*qathi*). Serta siapa yang bisa melaksanakan ijtihad dan bagaimana menjalankanya, semua itu merupakan persoalan yang hanya diputuskan oleh penalaran dan pertimbangan manusia²⁴. Dari sini, tak dapat disangskakan lagi bahwa al-

²² Dani Kamal Bahtiar, *Nasionalisme Menurut A. Hasan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

²³ Abd Salam Arif, “Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan Negara”, dalam A. Maftuh Abigebiel dkk., *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004). hlm. 3.

²⁴ Abdullah Ahmed Anna`im dalam *Islam dan Negara Sekuler*, alih bahasa oleh Sri Muniati, Cet I (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 31.

Qur'an memuat ayat-ayat yang menjadi landasan etik dan moral dalam membangun sistem sosial-politik²⁵.

Menurut Anthoni D Smith ada tiga sasaran umum nasionalisme : otonomi nasional, kesatuan nasional, identitas nasional²⁶. Dari sini muncullah definisi kerja Nasionalisme : suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bagi suatu populasi yang sejumlah anggotanya bertegak untuk membuat suatu bangsa yang aktual atau suatu bangsa yang potensial.²⁷ Sehingga Nasionalisme menjadi keharusan bagi umat Islam Indonesia, dalam hal ini menyangkut kepentingan akan kesatuan wilayah (*al-mal*) dan kesatuan jiwa (*an-nafs*) atas agama demi membangun pride dan generasi penerus (*an-nasl*)²⁸.

Terdapat dua model pendekatan dalam ilmu politik: *Pertama*, pendekatan tradisional yang memiliki beberapa aspek yaitu historis yang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk melacak dan menggambarkan berbagai fenomena politik legalistik yang memusatkan penelitiannya seputar konstitusi atau UUD. Institusional yang menganalisa tentang lembaga-lembaga Negara serta tugasnya. Sehingga pendekatan ini lebih bersifat analitis historis , legal institusional dan normatif deskriptif . *Kedua*, Pendekatan yang

²⁵ Abd Salam Arif, "Politik Islam Antara Aqidah dan Kekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abigebiel dkk., *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004). hlm. 3.

²⁶ Anthony , D. Smith, *Nasionalisme Teori, Ideologi, Sejarah* (Jakarta: Erlangga) hlm. 11.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hal ini sebagai mana terdapat dalam *Maqasid Syariah*, yaitu penjagaan terhadap Agama (*hifdu din*), Jiwa (*hifdu nafs*), Akal (*hifdu 'aql*), Keturunan (*hifdu nasl*), Harta (*hifdu mal*). Lihat Yudian Wahyudi, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea,2007).18-35.

berupaya menganalisa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara sistematis berdasarkan pengalaman empiris dengan menggunakan kerangka teori yang terperinci dan ketat yang dinamakan pendekatan behavioral yang lebih fokus pada perilaku politik dari lembaga-lembaga kekuasaan ataupun keyakinan dari sebuah ideologi politik.²⁹

Dalam diskursus politik Islam mempunyai tiga kekuatan fundamental: Bahasa politik, tradisi politik dan peradaban³⁰. *Pertama*, Bahasa politik. Bahasa disamping menjadi komunikasi persuasive juga merupakan praktek sosial politik dalam masyarakat tertentu yang erat kaitanya dengan bagaimana membangun identitas komunal memasarkannya dan mempertahankanya secara bersama-sama. Nasionalisme sebagai simbol sekaligus tanda bagi muslim Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisasi.

Kedua, Kekuatan tradisi politik. tradisi politik dalam pembentukanya bersifat dialektis, tidak lepas dari proses ideologisasi normatif dan capaian idealisme yang mengkondisi dengan *setting* sosial yang melingkupi disatu sisi dan dari capaian idealisme sebagai sebuah emulasi terhadap pemaknaan founding teks (al-Quran dan sunnah). Sehingga tidak sedikit para tokoh-tokoh Islam berbeda dalam pemaknaan terhadap Nasionalisme, seperti Al-Maududi³¹ dalam bukunya menjelaskan bahwa negara kebangsaan atau

²⁹ Meriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 4-5.

³⁰ Ahmad Yani Ansori, “Islam dan Negara bangsa di Indonesia,” makalah tidak di terbitkan, disampaikan dalam kuliah Fiqih Siyasah II, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijga. hlm. 2.

³¹ Abul Ala, Almaududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1992) hlm 298-300.

nasionalisme jelas tidak sesuai dengan Islam. Almaududi menjelaskan bahwa baginya tanah seluas satu kilometer persegi yang didalamnya ditegakan syariat Allah lebih dia pilih daripada seluruh semenanjung Asia yang tidak ditegakan syariat Allah didalamnya. Dan Almaududi memahami bahwa Nasionalisme pada dasarnya bersandar kepada demokrasi dan sekularisme.

Berbeda pula dengan Hasan al-Bana tokoh pergerakan Islam, memaparkan bahwa apabila yang dimaksud dengan Nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah air, keharusan berjuang membebaskan tanah air dari penjajahan, ikatan kekeluargaan antar masyarakat, dan pembebasan negeri-negeri lain maka Nasionalisme dalam makna demikian dapat diterima dan bahkan dalam kondisi tertentu dianggap sebagai kewajiban (Dault, 2005:xvii).³² Menurut Nurcholis Madjid, Nasionalisme dikaitkan dengan konsep madinah, Nasionalisme sejati, dalam artian suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa tanpa terkecuali adalah bagian integral konsep Madinah yang dibangun nabi.³³ Robert. N. Bellah juga menyebutkan bahwa sistem Madinah adalah suatu bentuk Nasionalisme yang Egalitarer Partisipatif (*“egalitarian participant nationalism”*).³⁴

Ketiga, kekuatan peradaban, Bahwa sejarah perang salib menjadi momok menyejarah yang tidak dapat didamaikan sehingga pola pikir umat

³² “Sejarah Nasionalisme dan Perspektif Islam”, imdad@ gmail.com, (01 Agustus 2007), akses 14 Maret 2008.

³³ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, Cet I (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), hlm. 70

³⁴ *Ibid.*

Islam maupun barat terkotakkan dalam *setting* konfrontasi dalam bentuk beturan peradaban sehingga kerap kali masyarakat dihadapkan pada dikotomi mukmin vs kafir, religius vs sekuler dan sebagainya. Sehingga polemik Islam atau kebangsaan pernah tercatat dalam sejarah perdebatan antara Sukarno dan A. Hasan, kedua tokoh ini mempunyai argumen masing-masing, Sukarno yang nasionalis sedangkan A. Hasan yang Islamis. Sukarno mengira negara Islam adalah teokrasi sebagaimana digambarkan barat sedangkan A. Hasan mengira Nasionalisme adalah sekularisme³⁵. Akan tetapi perdebatan itu mereda ketika pemerintah orde baru menerapkan sistem politik depolitisasi dan deideologisasi³⁶. Dengan penghentian perdebatan ini meminjam istilah kuntowijoyo sejarah kita menjadi “sejarah yang terputus” (*disrupted history*). Akibatnya pemikiran-pemikiran yang tersembunyi dalam ruang sejarah terputus tersebut menemukan momentumnya ketika rezim orde baru tumbang dan diganti dengan era reformasi.

Setelah itu polemik Islam dan kebangsaan muncul kembali, dalam menengahi perdebatan ini Kuntowijoyo menawarkan gagasan objektifikasi Islam. Obyektifikasi adalah penerjemahan nilai-nilai Islam kedalam kategori-kategori obyektif obyektifikasi Islam artinya penerjemahan nilai-nilai Islam yang telah diserap ke dalam struktur kesadaran internal menjadi bentuk-bentuk yang obyektif. Islam yang semula adalah nilai-nilai yang bersifat subyektif, dengan obyektifikasi di transformasikan menjadi nilai-nilai obyektif, lepas dari

³⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet I (Bandung : Mizan,1997), hlm. 73.

³⁶ Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir*, Cet I (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 129.

sifat subjektifitasnya.³⁷ Obyektifikasi Islam adalah konsep yang mendasarkan diri pada sebuah analisis sosial empiris bukan berangkat dari analisis yang bersifat tekstual.³⁸ Dalam pemahaman terhadap Islam, pendekatan ilmu digunakan untuk memahami ayat-ayat al-quran tidak sekedar formulasi normative, akan tetapi juga dapat dikembangkan menjadi formulasi teoritis ilmiah.³⁹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini demi mencapai hasil yang valid, yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun pakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.⁴⁰

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

³⁷ Makrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Logung Pustaka,2004).

³⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet I (Bandung : Mizan,1997), hlm. 73.

³⁹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung; Mizan 1991), hlm 305.

⁴⁰ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitaan dengan permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber primer: buku, Artikel, yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas.
- b. Sumber skunder: kamus ilmiah dan kamus besar Indonesia serta majalah, koran ataupun media massa yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*⁴¹, yaitu penelitian yang menjelaskan data dan memberikan pengertian tentang konsep nasionalisme religius dan indikator terjadinya pergeseran paradigma.

3. Analis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif⁴², yaitu memperhatikaan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif⁴³ dan deduktif⁴⁴ untuk mendapatkan

⁴¹ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

⁴² Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

⁴³ Induktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Nasionalisme religius sebagai gerakan politik pasca reformasi.

4. Pendekatan Penelitian

Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *historis* dan *sosiologis*. Pendekatan *historis* yaitu cara pendekatan masalah dengan melihat sejarah sehingga kronologi suatu peristiwa akan tersingkap dan adanya kesinambungan indikasi dalam peristiwa yang terjadi sekarang. Menurut Hadari Nawawi⁴⁵ pendekatan sejarah adalah pendekatan yang menjadikan pusat sejarah dimasa lalu untuk menjelaskan penjelasan yang terjadi sekarang. Sedangkan pendekatan *sosiologis* yaitu untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi serta fenomena dalam pergeseran paradigma nasionalisme religius yang terjadi di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pada suatu pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka perlu adanya sistematika yang korelatif dengan isi.

Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah sebagai uraian tentang fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni menyangkut pengertian dan gerakan politik Nasionalisme religius pasca reformasi, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berkaitan

⁴⁴ Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1998), hlm. 78-79.

dengan orisinalitas penelitian, dan pengembangan teori sebagai kerangka yang digunakan, metode penelitian digunakan sebagai arahan dan pedoman serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang pengertian Nasionalisme dan sejarah pembentukannya serta konsep Nasionalisme Religius.

Bab ketiga, memaparkan konsep nasionalisme religius diawali kemerdekaan, era orde baru dan Era Reformasi

Bab keempat, Analisis Pergeseran Nasionalisme Religius .

Bab kelima penutup, merupakan kesimpulan dari rumusan permasalahan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nasionalisme religius mengalami dinamika dalam setiap masa mulai dari awal kemerdekaan, cita-cita yang dibayangkan adalah terbentuknya dasar agama (islam) dalam Negara. Memasuki era orde baru nasionalisme religius mengalami depolitisasi sehingga para aktivisnya banyak yang meleburkan diri dengan pemerintah dan islam sudah dapat menerima pancasila. Secara umum orientasi dasar perjuangan dari Nasionalisme Religius adalah terbangunnya simbol-simbol Islam dalam wilayah kenegaraan seperti Negara Islam, konstitusi Islam struktur dan infrastruktur politik Islam. Meskipun karakter perjuangannya ada yang radikal dan moderat. Mereka meleburkan diri dalam persoalan politik.
2. Nasionalisme religius pasca reformasi hanya sebagai komoditas politik, Nasionalisme religius terbentuk tidak hanya berbasis agama. Tetapi, lebih pada upaya pengagamaan terhadap politik, agama dijadikan sebagai komoditas politik untuk mendapatkan kekuasaan (*way to power*).

B. Saran-Saran

1. Agar tidak terjadi kertepatan sejarah, wacana nasionalisme dan religius harus terus didiskusikan sehingga dikotomi antara sekuler dan religius akan menemukan sintesa baru.
2. Agar tidak terjadi pengagamaan politik maka hubungan agama dan Negara harus dimaknai secara substantif. Kaum nasionalis religius tidak lagi menuntut formalisasi ajaran dalam Negara. Namun, berdasarkan pemahaman mereka terhadap baik ajaran agama maupun corak sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, mereka berkiprah dalam pembangunan sebuah sistem sosial-politik yang mencerminkan, atau sejalan dengan, prinsip-prinsip umum nilai-nilai agama, termasuk keadilan, musyawarah, egalitarianisme, dan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqih/Ushul Fiqih

Ala Abu, Almaududi, "Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Mizan. Bandung. 1992.

Anna'im, Abdullah Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler*, alih bahasa oleh Sri Muniati, Cet I, Bandung: Mizan, 2007.

Efendi, Bahtiar *Islam dan Negara: Transformasi pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia*, Cet I, Jakarta: PARAMADINA, 1998.

Karim, Rusli *Negara dan pemunggiran Islam politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet I, Bandung : Mizan,1997.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Intepretasi Untuk Aksi*, Cet I, Bandung; Mizan 1991.

Munajat, Makrus M. Hum, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Syamsudin, Din, *Islam Dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,2001

Wahyudi, Yudian, *Maqasid Syariah Dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea,2007

B. Kelompok Lain-lain

Abdurahman, Dudung *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abigebriel, A. Maftuh dkk., *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004

- Afandi, Arif (ed), *Islam Demokrasi Atas Bawah; Polemic Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur Dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Anderson, Benedict, *Komunitas-Komunitas Imaginer: Renungan dan asal usul penyebaran Nasionalisme*, alih bahasa Omi Intan Naumi, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Budiharjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Budi Hardiman, Fancisco, *Kritik ideologi;Pertautan Ilmu Pengetahuan dan Kepentingan*, cet II, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Djamaludin Malik, Dedy, *Zaman Baru Islam Indonesia Pemikiran Dan Aksi* , cet, 1 (Bandung: Zaman wacana mulia,1998)
- Dhont, Frank, *Nasionalisme baru intelektual tahun 1920-an*, Cet I, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2005.
- Eko, Sutoro, *Transisi Demokrasi Indonesia;Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Cet I Yogyakarta: APMD Press, 2003.
- Juergensmeyer, Mark “Menentang Negara Sekuler ; Kebangkitan Global Nasionalisme Religius”, Bandung : Mizan, 1998.
- Hidayat, Komarudin, *Menjadi Indonesia; 13 abad Eksistensi Islam di bumi Nusantara*, Cet I, Jakarta: Mizan, 2006.
- Hikam, M. AS., *Politik Kewarganegaraan; landasan Redemokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Kahin, George M.T., *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*, alih bahasa Nin Bakdi Soemanto, Cet. I., UNS Press, 1995.
- Kohn, Hans (1961) “Nasionalisme, Arti dan Sedjarahnja” PT Pembangunan Djakarta. Jakarta.
- Madjid, Nurcholis *Indonesia Kita*, Cet I, Jakarta: PT. Gramedia, 2004.
- Ma’arif, Syafi’I, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru*, Cet I, Jakarta: Paramadina, 1995.

Mu'nim ,Abdul (ed), *Islam Ditengah Arus Transisi*, Cet I, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2000

Noer, Deliar (et.al), *Mengapa Partai Islam Kalah, Perjalanan Politik Islam Dari Pra Pemilu Sampai Pemilihan Presiden*, Cet I, Jakarta: Alvabet, 1999

Putra, Fadilah, *Partai Politik Dan Kebijakan Publik Analisis Dan Konfigurasi Janji Politik Patai Relisasi Produk Kebijakan Public Di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003

Renan, Ernest, *Apakah Bangsa itu ?,(Qu'est cequ'une nation)*, alih bahasa Prof,Mr. Sunario, Bandung: Alumni, 1994

Richlefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Cet II, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Sadilly, Hasan, *Ensklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiyar Baru-Vaoove, 1983.

Sage, Lazuardi Adi, *Sebuah catatan sudut pandang siswono tentang Nasionalisme dan Islam*, Jakarta; Jakarta Citra Media,1996.

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, cet ke-3, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi,1964.

Suhartono, *Sejarah pergerakan nasional dari budi utomo sampai proklamasi 1908-1945*, cet.ke-2, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2001.

Syaefudin Ansori, Endang *Piagam Jakarta Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Cet I, Jakarta: Rajawali 1986.

Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Toha, Idris *Demokrasi Religius, Pemikiran Nurkholis Majid dan Amin Rais*, Jakarta: Teraju, 2005.

Smith, D Anthony "Nasionalisme Teori, Ideologi, Sejarah, Jakarta: Erlangga.

Yatim, Badri, Soekarno, *Islam Dan Nasionalisme Restrukturisasi Pemikiran Islam Nasionalis*, Cet I, Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985.

Zahrah, Abu (ed), *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius Di Indonesia*, Cet I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

Ansori, Ahmad Yani “*Islam dan Negara bangsa di Indonesia*,” makalah tidak di terbitkan, disampaikan dalam kuliah Fiqih Siyasah II, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN sunan Kalijga.

Amir, Sulfikar, “Epistemologi Nasionalisme”, (Rabu 03 November 2004), berita kompas, hlm. 6 www.kompas.com.

Haq, Saiful, Refleksi Nasionalisme Setelah 10 Tahun Reformasi, www.google.com.

J.Piliang, Indra, “Pilihan Paket Koalisi Capres dan Cawapres”, www.unisosdem.org.

Karman, Yonky, “Dari Religiusitas menuju Nasionalisme,” <http://www.sinarharapan.co.id.html>

“Magma dan dikotomi Nasionalis Religius”, www.paramadinawordpres.com.

Mapaeng Fatwa, Andi, “Nasionalisme Religius dan Stereotip Terorisme Global”,, <http://www.bluewater.co.id>

Nasir, Haidar, “Reformasi Dipersimpangan Jalan, Republika”, 12 Februari 1999.

“Nasionalisme-Religius di Indonesia”, <http://anditoaja.wordpress.com>.

Nurdin, Muh Hermawan Ibnu, “Islam,Nasionalisme dan Nasionalisme Islam,” <http://mhermawan.blogspot.com/2007/09/Islam-Nasionalisme-dan-Nasionalisme.html>.

“Paradigma politik islam”, <http://fpkssda.wordpress.com/2007/10/27/alih-paradigma-politik-Islam/>.

“Partai Demokrat Menentang Politisasi Agama”,<http://hariansib.com/2009/01/17/>. Nasionalis-Religius: Jadi Komoditas Politik, <http://gmnri.wordpress.com/>.

Ruslani, “Nasionalisme-religius”,<http://www2.kompas.com/>.

Sandhiyudha, Arya, “Orde Baru Vs Orde Lama: Sebuah Gambaran Konstalasi Politik”, <http://pilihan.net/ind/2008/08/01/orde-lama-vs-orde-baru/>.

”Sejarah Nasionalisme Dan Prespektif Islam”, <http://azizahainiwordpers.com>.

Suhelmi, Ahmad, ”Sejarah Nasionalisme Dalam Prespektif Islam”,
<http://cidesonline.org>.

Suryana, Yayan, ”Wacana Politik Islam pasca Orde baru”, <http://thinker-boyzz.blog.frendster.com>.

”Waspadai Redefinisi Nasionalisme”, www.kompas.com.

CURRICULUM VITAE

Nama : Solahudin
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 15 April 1984
Alamat Asal : Margamulya Rt II/I, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. (53254)
Alamat Yogyakarta : Wisma Palupi GK 487 Gendheng Yogyakarta
Nama Ayah : Khumsosih Susyanto.
Nama Ibu : Rusmisoh

Pendidikan

1. SD N 07 Gandrung Mangu (1991-1996)
2. SLTP N 01 Gandrung Mangu (1996-1999)
3. MAK AL-IMAN Bulus Purworejo (1999-2002)
4. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-sekarang)

Pengalaman Organisasi

- Ketua OSIS MA Al-Iman Bulus Purworejo (2001-2002)
- Ketua Pengembangan Intelektual dan Wacana HMI Komisariat Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004-2005)
- Staf Lembaga Studi Islam Pembebasan (LSIP) Kordiska UIN Sunan Kalijaga (2004-2005)
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Cilacap Yogyakarta (HIMACITA) (2005-2006)
- Ketua Umum Kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006)

- Staf Advokasi Kebijakan Publik HMI Cabang Yogyakarta (2005-2006)
- Presidium Dalam Negeri FORKOM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006)
- Anggota Tim perencana dan pengawas DPP Universitas, UIN Sunan Kalijaga (2006-2007)